

# REFORMULASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMENEP

<sup>1</sup>M. Mushthafa, <sup>2</sup>Mohammad Takdir, <sup>3</sup>Ah. Syamli, <sup>4</sup>Paisun

<sup>1234</sup>Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep

Email: [mohammadtakdir86@gmail.com](mailto:mohammadtakdir86@gmail.com), [paisun89@gmail.com](mailto:paisun89@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep yang dikelola sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional. Penelitian ini mengungkap tiga permasalahan utama, yaitu (1) bagaimana kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep (2) bagaimana implementasi standar mutu pengelolaan lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep (3) bagaimana dampak kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif-lapangan pada beberapa 8 lembaga tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumenep, yakni di Kecamatan Pragaan dan Kecamatan Batang-Batang. Untuk mengumpulkan data di lapangan, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, bentuk kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep, yaitu kebijakan pendirian lembaga baru, penerimaan peserta didik, kesejahteraan guru, dan pemerataan pendidikan tingkat sekolah dasar. Kedua, implementasi standar mutu pengelolaan lembaga pendidikan dasar dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan keterampilan, bakat, dan minat siswa, peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan, penerapan sekolah berbasis digital dan literasi, peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi program sekolah, dan peningkatan skill kepemimpinan kepala sekolah. Ketiga, dampak kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep adalah moratorium pendirian lembaga baru, pembatasan pembangunan sekolah, re-grouping lembaga, persaingan dan perebutan murid, dan tertibnya sistem penerimaan siswa baru.

**Kata kunci:** Kebijakan, Pendidikan Dasar, Pengelolaan, Mutu Sekolah

## Abstract

*This research aims to elaborate the policy of managing basic education institutions, the implementation of quality standards for the management of basic education institutions, and the impact of policies on the management of basic education institutions in Sumenep Regency. This research uses a field-qualitative method at several 8 elementary school-level institutions in Sumenep Regency, namely in Pragaan District and Batang-Batang District. To collect data in the field, researchers used three data collection techniques, namely observation, interview, and documentation techniques. Results This study produced three main findings. First, the form of policies for managing basic education institutions in Sumenep Regency, namely policies for establishing new institutions, accepting students, teacher welfare, and equal distribution of education at the elementary school level. Second, the implementation of quality standards for the management of basic education institutions is carried out by increasing the availability of school facilities and infrastructure, increasing students' skills and talents, increasing the professionalism of teachers and education personnel, implementing digital and literacy-based schools, increasing supervision, monitoring and evaluating school programs, and improvement of principal's leadership skills. Third, the impact of policies on the management of basic education institutions in Sumenep Regency are a moratorium on the establishment of new institutions, restrictions on school construction, re-grouping of*

*institutions, competition and competition for students, and an orderly system of new student admissions.*

**Keywords:** Policy, Basic Education, Management, School Quality

## Pendahuluan

Keberadaan lembaga pendidikan bagi masyarakat merupakan wahana strategis dalam membentuk generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing di tengah persaingan hidup yang semakin kompetitif. Pendidikan merupakan upaya strategis dan menentukan dalam membentuk karakter dan moral generasi muda yang menjadi tumpuan harapan bangsa di masa depan.<sup>1</sup> Keberadaan lembaga pendidikan harus sejalan dengan kebutuhan dan komitmen kebangsaan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa yang menjadi cita-cita mendasar dari sistem pengelolaan pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi.

Meski demikian, di beberapa lembaga pendidikan tingkat dasar masih terdapat banyak permasalahan klasik yang menghambat kemajuan pendidikan secara signifikan. Pada tingkat sekolah dasar, permasalahan pengelolaan lembaga pendidikan lebih mudah ditemukan dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ini karena, tingkat sekolah dasar dianggap sebagai level pendidikan yang masih rendah dan kurang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah atau pihak

berwewenang yang menangani langsung pengelolaan lembaga pendidikan dasar.

Ada beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan sistem pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Sumenep. Salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar tidak mengejar kualitas, tapi kuantitas. Banyak sekolah di berbagai daerah yang tidak lagi fokus pada pengembangan mutu sekolah, baik dari pengembangan potensi peserta didik atau peningkatan profesionalisme guru. Bahkan, untuk memperoleh peserta didik yang banyak, mereka melakukan segala cara asalkan sesuai dengan target yang diinginkan. Persaingan antar sekolah di beberapa lembaga pendidikan, menyebabkan sekolah yang kalah saing dalam perekrutan peserta didik menjadi tidak berdaya. Namun, lembaga pendidikan tersebut tetap berjalan dan menerima peserta didik walaupun hanya sedikit. Pada akhirnya, eksistensi lembaga pendidikan dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dari pihak-pihak terkait.

Permasalahan yang sangat klasik ditemui di lapangan adalah mudahnya perizinan untuk mendirikan lembaga pendidikan, khususnya sekolah swasta yang hanya dijadikan instrumen untuk memperoleh dana operasional sekolah. Penyelenggaraan pendidikan dijadikan

---

<sup>1</sup> Mohammad Takdir, *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

sebagai batu loncatan untuk memperoleh bantuan dana dari pemerintah. Hal ini menjadi permasalahan pelik yang dapat membuat mutu pendidikan semakin jauh dari harapan, karena penyelenggaraan pendidikan hanya dijadikan sebagai alat untuk meraup keuntungan dari aspek bisnis dan komersial. Orientasi pengembangan keilmuan dan pencerdasan kehidupan anak bangsa mengalami pergeseran pada arah orientasi keuntungan atau profit yang banyak disalahgunakan oleh para pemangku kepentingan di tingkat sekolah dasar atau di tingkat sekolah lainnya.

Pada akhirnya, sekolah yang tidak sesuai standar mutu berjalan tanpa visi dan misi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Salah satu permasalahan lain yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan tingkat dasar adalah minimnya fasilitas dan prasarana sekolah yang mendukung tercapainya standar mutu pembelajaran. Di daerah-daerah terpencil, permasalahan minimnya sarana dan prasaran pendukung kegiatan pembelajaran menjadi problem klasik yang belum sepenuhnya dapat diatasi oleh pemangku kebijakan terkait. Permasalahan gedung sekolah yang tidak layak pakai menjadi problem utama yang menghambat berjalannya iklim pembelajaran dan menyebabkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas.

Dalam aspek pengelolaan kelembagaan, banyak sekolah tingkat dasar yang harus gulung tikar akibat

tidak memiliki manajemen yang baik dalam mengelola lembaga pendidikan. Kurangnya manajemen yang baik antara pihak sekolah dan yayasan dalam melakukan pendampingan terhadap peningkatan mutu sekolah menjadi permasalahan klasik yang terjadi di beberapa sekolah di Kabupaten Sumenep. Permasalahan yang muncul dari manajemen sekolah adalah salah satunya adalah pola pikir tenaga pendidik yang cenderung *financial oriented*. Selain itu, filosofi dan paradigma tujuan pendidikan masih bersifat artifisial, sehingga penyelenggaraan pendidikan cenderung terjadi salah kaprah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik secara maksimal.

Selain itu, pengelolaan lembaga pendidikan tidak bisa lepas dari peran tenaga pendidik atau guru yang menjadi garda terdepan dalam peningkatan mutu sekolah, baik peningkatan prasetasi peserta didik maupun kemajuan sekolah secara institusional. Pada intinya, rendahnya kualitas guru dalam bidang keilmuan tertentu merupakan problem tersendiri yang dihadapi oleh lembaga pendidikan di Kabupaten Sumenep. Ada kecenderungan bahwa guru atau tenaga pendidik di tingkat sekolah dasar tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan materi yang diampu, sehingga kegiatan pembelajaran di kelas kurang maksimal dan cenderung berjalan secara stagnan. Ini karena, guru atau tenaga pendidik tidak menguasai terhadap apa yang diajarkan dan peserta didik menjadi

bingung dengan materi yang diterima. Jika permasalahan kualitas guru tidak diselesaikan dan belum menemukan solusinya, maka akan berdampak pada rendahnya kecerdasan peserta didik dalam mengembangkan keterampilannya secara optimal.

Dari berbagai permasalahan pengelolaan lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep, maka penelitian ini dianggap penting bagi masa depan sekolah yang berorientasi pada masa depan. Ini karena, beberapa lembaga pendidikan di tingkat sekolah dasar sangat memprihatinkan dari aspek kelayakan sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya memberikan kenyamanan bagi tenaga pendidik, peserta didik, dan segenap komunitas di lingkungan sekolah sekitar. Sebagai salah satu kabupaten paling timur di pulau Madura, terdapat banyak sekolah yang belum memenuhi persyaratan secara standar mutu penyediaan sarana dan prasarana, baik gedung sekolah yang ditempati, fasilitas pendukung sekolah, dan penyediaan sarana dan prasarana yang kurang mendukung iklim pembelajaran di sekolah.<sup>2</sup>

Pada akhirnya, dibutuhkan reformulasi kebijakan pengelolaan pendidikan tingkat dari pemangku kepentingan, baik dari Dinas Pendidikan yang membawahi sekolah dasar negeri

(SDN) dan Kementerian Agama yang menaungi pendidikan Madrasah Ibtidiyah (MI). Sebagai bagian dari satuan lembaga pendidikan, tingkat sekolah dasar membutuhkan penguatan secara institusional untuk mencapai standar mutu sekolah yang berbasis pada Manajemen Berbasis Sekolah sebagai prinsip dasar dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Ini karena, ada beberapa standar mutu sekolah yang perlu dibenahi dan dilakukan reformulasi dalam bentuk kebijakan dari pemangku kepentingan di wilayah pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Dalam kajian tentang reformulasi kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan dasar, penelitian ini mengambil sampel beberapa sekolah yang berbasis negeri dan keagamaan maupun sekolah yang dianggap sekolah favorit dan memiliki standar mutu yang tinggi dalam pengelolaan sekolah dan sekolah-sekolah yang membutuhkan penanganan serius dalam hal pengelolaan dan penjaminan mutu sekolah secara memadai. Hal ini dilakukan sebagai perbandingan dalam hal pengelolaan mutu sekolah, baik sekolah dasar negeri maupun Madrasah Ibtidaiyah yang levelnya sama dengan SD. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi sistem pengelolaan secara institusional di lembaga tingkat

---

<sup>2</sup> Nuris Syarifatul Imamiyah, Ainur Rofieq dan Mohammad Syaifuddin, "Analisis Problematika Pembelajaran Sekolah Dasar Negeri di Pulau Giliyang Kabupaten Sumenep," *Jurnal*

*Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 6 (1), 2018, 158-174.

<sup>3</sup> Amir Chalis Ardiyansyah, "Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun", *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 2 (2), 2018, 105-115.

sekolah dasar, baik negeri maupun swasta dalam mencapai standar mutu sekolah yang menjadi persyaratan sebagai sekolah favorit dengan akreditasi lembaga yang membanggakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan standar mutu sekolah tingkat dasar yang membutuhkan perhatian dan komitmen dari pemangku kebijakan agar kinerja sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajar memberikan dampak positif bagi pengembangan keterampilan peserta didik.

Sebagai salah satu Kabupaten paling timur di pulau Madura, Kabupaten Sumenep bukan sekadar berpotensi dari aspek sumber daya alam yang sangat melimpah, baik di kepulauan maupun daratan, melainkan dari aspek pembangunan sumberdaya manusia melalui pengelolaan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Permasalahan pengelolaan lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta merupakan tanggung jawab sepenuhnya pihak pemerintah Kabupaten Sumenep melalui dinas-dinas terkait yang membawahi lembaga pendidikan, terutama sekolah-sekolah yang membutuhkan perhatian serius dan tindaklanjut untuk diatasi berbagai permasalahan yang membelitnya. Tercapainya standar mutu sekolah melalui penyelenggaraan pendidikan di tingkat dasar merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan Kabupaten Sumenep dari bidang pendidikan yang menjadi tonggak utama kemajuan masyarakat di

masa depan. Tidak heran bila reformulasi kebijakan di bidang pengelolaan lembaga pendidikan dasar menemukan signifikansinya untuk ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai masukan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan yang membawahi penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar negeri dan Kementerian Agama yang menaungi madrasah ibtidaiyah dalam melakukan reformulasi kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital yang semakin pesat, dibutuhkan reformulasi sekaligus inovasi baru dalam bentuk kebijakan strategis untuk mengelola lembaga pendidikan tingkat dasar sesuai standar mutu pendidikan nasional, yang mengacu pada 8 standar utama, yaitu (1) standar isi (pelaksanaan dan pengembangan kurikulum), (2) standar proses (pelaksanaan pembelajaran) (3) standar evaluasi pendidikan (penilaian evaluasi pembelajaran, (4) standar kompetensi lulusan (hasil belajar anak didik, (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan (kualifikasi dan kompetensi pendidik, (6) standar pengelolaan (pengelolaan seluruh aspek di institusi sekolah, (7) standar pembiayaan (anggaran sekolah), dan (8)

standar sarana dan prasarana (infrastruktur pendidikan).

Berdasarkan standar mutu pendidikan di tingkat sekolah dasar yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka akan ditemukan terkait dengan pencapaian standar dan kinerja sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar yang ditentukan. Hal ini menjadi pendorong bagi sekolah-sekolah lain untuk memenuhi standar mutu sehingga kegiatan pembelajaran di kelas benar-benar memberikan dampak positif bagi pengembangan kecerdasan dan keterampilan peserta didik dalam mengarungi kompleksitas kehidupan yang semakin ketat.

Penelitian tentang pengelolaan lembaga pendidikan dasar telah banyak dilakukan oleh para ahli dan peneliti yang konsen pada manajemen pendidikan dasar. Penelitian tentang pelaksanaan pengelolaan pendidikan madrasah dilakukan oleh Maisaroh yang berjudul *"Quality of Educational Management at the Elementary School: Case Study on Madrasah Ibtidaiyah Jakarta"*. Penelitian ini mempertanyakan tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan pendidikan madrasah, permasalahan yang dihadapi, dan upaya dalam memperbaiki sistem pengelolaan mutu madrasah agar menjadi lembaga

pendidikan yang bermanfaat bagi peserta didik. Penelitian ini menunjukkan sistem pengelolaan pendidikan madrasah dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme guru, pengembangan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan perbaikan administrasi sekolah.<sup>4</sup>

Penelitian tentang pengelolaan pendidikan berbasis sekolah dilakukan oleh Sahril Muhammad dan Mardika Rahman yang berjudul *"Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Sekolah Dasar Islam Insan Kamil Bacan Kabupaten Halmahera Selatan"*. Penelitian ini dilatarbelakangi amburadulnya sistem pengelolaan pendidikan dasar yang menghambat terhadap peningkatan mutu sekolah secara keseluruhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah pada sekolah dasar Islam teralisasi dengan baik sesuai tujuan dan sasaran MBS pada aspek pengembangan kurikulum dan pengkayaan metode pembelajaran, sarana dan prasarana, dan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak implementasi sistem pengelolaan mutu sekolah semakin meningkatkan kinerja guru dan sekolah dalam melakukan penataan administrasi dan transparansi pembiayaan secara lebih efektif.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Maisaroh, "Quality of Educational Management at the Elementary School: Case Study on Madrasah Ibtidaiyah Jakarta", *JMIE: Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education*, 2 (1), 2018, 144-154.

<sup>5</sup> Sahril Muhammad dan Mardika Rahman, "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Sekolah Dasar Islam Insan Kamil Bacan Kabupaten Halmahera

Penelitian yang sangat penting sebagai bagian dari kajian terdahulu adalah penelitian Elvi Rahmi, Achmad Patoni, dan Sulityorini tentang pengembangan manajemen pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pendidikan, yang berjudul *Management of Human Resources Development in Increasing the Quality of Islamic Education Institutions in Excellent Islamic Elementary School Kota Bukittinggi*. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan bahwa pengembangan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan dilakukan (1) memberikan pelatihan kinerja dalam bentuk *Quantum Teaching* dan *Quantum Learning* bagi guru (2) membentuk kelompok kerja guru dengan tujuan meningkatkan kompetensi mereka sebagai tenaga pendidik dalam membantu pengembangan mutu pendidikan tingkat dasar.<sup>6</sup>

Penelitian tentang peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar dilakukan oleh Sakadari, Miftachul Huda, Eko Perianto, Haryanto, dan Edi Subarkah, yang berjudul *Improving Educational Quality of Elementary School in Indonesia: An Emperical Research*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam

peningkatan mutu pendidikan pada sekolah dasar inklusif di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan program peningkatan mutu pendidikan berbasis visi, misi, dan tujuan sekolah inklusi. Pelaksanaan program dilakukan dikelola berbasis kurikulum 2013, struktur yang terorganisir, dan implementasi peraturan sekolah, dan penataan administrasi kelembagaan sekolah. Sementara itu, evaluasi dilakukan pada aspek efektivitas pembelajaran dan kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah inklusi.<sup>7</sup>

Penelitian yang relevan dengan pengelolaan lembaga pendidikan adalah penelitian yang dilakukan oleh Raja Suzana, Makruf Akbar, dan R. Madhakomala, yang berjudul *Character Educational Management: A Case Study in the Elementary School Penyengat Island*. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pendidikan karakter pada tingkat sekolah dasar dilakukan dengan melakukan penataan pada aspek pengembangan kurikulum, peningkatan profesionalisme guru, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai dalam menunjang kegiatan proses pembelajaran.<sup>8</sup> Penelitian ini lebih fokus

---

Selatan", *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 15 (1), 2017, 610-620.

<sup>6</sup> Elvi Rahmi, Achmad Patoni, dan Sulityorini, "Management of Human Resources Development in Increasing the Quality of Islamic Education Institutions in Excellent Islamic Elementary School Kota Bukittinggi", *Al-Ta'lim Journal*, 27 (2), 2020, 166-178.

<sup>7</sup> Sakadari, Miftachul Huda, Eko Perianto, Haryanto, dan Edi Subarkah, "Improving Educational Quality of Elementary School in Indonesia: An Emperical Research", *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56 (4), 2021, 330-336.

<sup>8</sup> Raja Suzana, Makruf Akbar, dan R. Madhakomala, "Character Educational Management: A Case Study in the Elementary

pada bagaimana manajemen pendidikan karakter yang diterapkan di tingkat sekolah dasar yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemangku kepentingan, terutama peran tenaga pendidik dalam memberikan pembinaan secara serius kepada peserta didik.

Secara spesifik, ada penelitian yang fokus pada manajemen pendidikan bagi tingkat sekolah dasar, yang berjudul *“Educational Management for Elementary Based on Baiquniyyah Koranic School”*. Penelitian ini fokus pada pengelolaan pendidikan di sekolah dasar dengan menggunakan prinsip-prinsip sekolah al-Qur’an Baiquniyyah. Penelitian ini lebih menekankan pada pengembangan pendidikan pada anak didik dengan landasan al-Qur’an yang sangat kuat sehingga bisa membentuk generasi qur’ani yang berkontribusi penting bagi kepentingan umat dan masyarakat secara umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan pada tingkat sekolah dasar di Pleret Yogyakarta, dilakukan dengan menerapkan perpaduan kurikulum agama dan kurikulum nasional, dengan lebih banyak menekankan pada pengajaran al-Qur’an sebagai prinsip utamanya.<sup>9</sup>

Pengelolaan mutu pendidikan di tingkat sekolah dasar, tidak cukup hanya

dengan mengandalkan pada peningkatan profesionalisme guru sebagai tenaga pendidik, melainkan juga dibutuhkan peran aktif para orangtua dalam mendukung peningkatan mutu sekolah. Penelitian ini dilakukan oleh Raden Bambang Sumarsono, Ali Imron, Bambang Budi Wiyono, dan Imron Arifin dengan judul *“Parent’s Participation in Improving the Quality of Elementary School in the City of Malang, East Java, Indonesia”*. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi orangtua dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar dilakukan dalam bentuk pembelajaran, bantuan modal pendidikan, hubungan yang baik dengan masyarakat, dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, tidak ada satu pun penelitian yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini fokus pada analisis kebijakan dari pemerintah dalam mereformulasi pengelolaan pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Sumenep. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengungkap implementasi standar mutu pengelolaan pendidikan dasar dan dampak kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan dasar di Kabupaten

---

School Penyengat Island”, *Indonesian Journal of Educational Review*, 5 (1), 2018, 23-27.

<sup>9</sup> Ahmad Agung Yuwono Putro, Suyanto, dan Yoyon Suryono, “Educational Management for Elementary Based on Baiquniyyah Koranic School”, in *2nd International Conference on Educational Management and Administration*, 45 (1), 2017, 132-137.

<sup>10</sup> Raden Bambang Sumarsono, Ali Imron, Bambang Budi Wiyono, dan Imron Arifin, “Parent’s Participation in Improving the Quality of Elementary School in the City of Malang, East Java, Indonesia”, *International Education Studies*, 9 (10), 2016, 256-262.



Sumenep. Dari fokus penelitian saja, penelitian ini menunjukkan adanya kebaruan atau novelty sebagai sebuah penelitian yang berusaha menghasilkan temuan dan rekomendasi bagi pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah dasar secara profesional dan mandiri sesuai dengan tujuan awal diselenggarakannya lembaga pendidikan, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penelitian ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi sekolah-sekolah untuk meningkatkan standar mutu pendidikan dan permasalahan pengelolaan lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep dapat terselesaikan. Penelitian ini juga bisa menjadi prototype bagi sekolah lain yang belum memenuhi standar mutu agar dilakukan pendampingan dari pihak yang berwenang untuk peningkatan pengelolaan lembaga pendidikan dasar yang memperhatikan dari aspek kelayakan fasilitas sekolah maupun sistem pengelolaan yang amburadul.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*), karena penelitian ini berupaya untuk mengungkap reformulasi kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk

mendeskrripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Dalam realitas sosial atau kondisi pendidikan yang terjadi di masyarakat, seringkali menjadi sasaran penelitian untuk menganalisis tentang perilaku, tindakan, tradisi, kreativitas, dinamika, sikap, dan respon masyarakat terhadap sebuah kebijakan yang berkaitan langsung dengan masa depan pendidikan, termasuk dalam hal pengelolaan lembaga pendidikan.

Penelitian kualitatif ini berusaha menjelaskan dan memahami fenomena sosial-sebagaimana masyarakat itu sendiri mempersepsikan diri mereka (*to learn from the people*) atau bersifat emik (*emic-factors*).<sup>11</sup> Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan signifikansi reformulasi pengelolaan lembaga pendidikan tingkat dasar untuk menyiapkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan. Sementara tipe penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan gejala atau kenyataan yang ada sehingga data yang disimpulkan dalam penelitian akan dijelaskan dengan metode kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dengan meneliti sekelompok manusia atau komunitas, suatu objek, suatu hal kondisi, suatu sistem atau konsep

---

<sup>11</sup> Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Dari Denzin Guba dan*

*Penerapannya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 11.

pemikiran yang berkembang sampai sekarang.<sup>12</sup>

Jenis penelitian yang dipakai peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berusaha terjun langsung ke lokasi penelitian untuk menemukan bentuk-bentuk reformulasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam mereformasi pengelolaan lembaga pendidikan tingkat dasar dan implementasi standar mutu pengelolaan lembaga pendidikan dasar. Penelitian lapangan pada satu objek penelitian ini dimaksudkan untuk memahami implementasi standar mutu pengelolaan lembaga pendidikan dasar dalam meningkatkan pelayanan pendidikan kepada peserta didik secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus-fenomenologis untuk mengungkap gejala atau fenomena (peristiwa atau fakta) yang menyita banyak perhatian masyarakat secara luas berkaitan dengan kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap implementasi standar mutu pengelolaan lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep berdasarkan fakta yang terjadi di lokasi penelitian yang dipilih. Penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus dilakukan secara terinci, mendalam, dan intensif pada salah satu lembaga, organisasi, atau gejala-gejala tertentu. Pada intinya, penelitian studi

kasus berusaha melacak suatu peristiwa, hubungan antar pribadi atau kelompok, dan menemukan fenomena-fenomena kunci yang merangkai suatu peristiwa atau gejala tertentu. Isu-isu yang muncul dalam penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif meliputi pada struktur kelompok, organisasi, lembaga, dan struktur lingkungan sosial dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa lembaga pendidikan tingkat dasar di Kabupaten Sumenep, yang terfokus di dua Kecamatan, yakni di Kecamatan Pragaan dan Kecamatan Batang-Batang. Lembaga pendidikan tingkat dasar di Kecamatan Pragaan dilaksanakan di empat sekolah tingkat dasar, yaitu di SDN Pragaan Laok 1, Madrasah Ibtidaiyah Al-Ghazali Rombasan, SDN Kaduara Timur, dan MI Nurul Hidayah Pragaan Daya. Sementara itu, lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar di Kecamatan Batang-Batang juga dilaksanakan di empat lembaga, yaitu SDN Dapenda I, MI Taufiqurrahman Banuaja Timur, SDN Banuaja Barat II, dan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Batang-Batang Daya.

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan beberapa sekolah dasar negeri dan madrasah yang dianggap memiliki standar mutu dalam pengelolaan pendidikan dan sekolah-sekolah yang masih berjuang dalam mencapai standar mutu pendidikan.

---

<sup>12</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 23.

<sup>13</sup> Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya* (Malang: Banyu Media Publishing, 2004), 62-63.

Pertimbangan pemilihan sekolah unggulan atau favorit sebagai inspirasi bagi sekolah lain dalam memperkuat sistem pengelolaan pendidikan berdasarkan pada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Educational Quality Management (EQM). Sementara itu, pemilihan sekolah yang masih jauh dari kata maju didasarkan atas pertimbangan untuk memberikan pendampingan dalam sistem pengelolaan secara institusional sehingga menjadi perhatian dari dinas terkait untuk lebih memerhatikan sekolah-sekolah tingkat dasar yang memprihatinkan.

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam memperoleh data berdasarkan jenis penelitian yang dipilih.<sup>14</sup> Ada tiga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, metode observasi. Dalam pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan observasi sebagai metode untuk mengamati sebuah peristiwa atau kondisi di lingkungan sekolah yang menjadi lokasi penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi partisipasi atau peneliti bersikap sebagai *participant as observer*, merupakan salah satu jalan untuk berusaha masuk (*getting in*) menjadi partisipan dari masyarakat sebagai subjek penelitian.<sup>15</sup> Adapun data

observasi yang dibutuhkan dalam penelitian adalah profil sekolah, kondisi gedung sekolah, fasilitas pendukung, administrasi sekolah, suasana kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler.

Kedua, metode wawancara. Wawancara digunakan untuk memastikan dan mengecek informasi yang diperoleh melalui hubungan tatap muka yang berbentuk tanya jawab kepada seseorang atau komunitas yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Maka wawancara dilakukan untuk menggali data dari informan secara lebih mendalam (*indept interview*),<sup>16</sup> misalnya Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Kepala Sekolah SDN di Kecamatan Pragaan dan Batang-Batang, guru-guru, siswa, dan masyarakat di lingkungan sekolah.

Ketiga, metode dokumentasi. Metode ini berasal dari buku-buku, jurnal, dokumen tertulis, gambar, maupun bentuk dokumentasi lain yang bisa memperkuat data di lapangan berkaitan dengan manajemen mutu pendidikan tingkat sekolah dasar. Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui data yang tersedia, biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto.<sup>17</sup> Dengan kata lain, dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang. Data ini

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2002), 308-309.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 128.

<sup>16</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 144.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 82.

bersifat tak terbatas pada ruang dan waktu.<sup>18</sup>

Peneliti menggunakan analisis mendalam (*deep analysis*) untuk mengurai secara lebih detail data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis data, peneliti melakukan beberapa tahapan seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, memaparkan bahan empirik, menarik kesimpulan atau memverifikasi.<sup>19</sup>

### Hasil dan Pembahasan

Bagian ini merupakan analisis terhadap reformulasi kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep. Sebagai bagian penting dari sebuah penelitian, bab ini mencakup hasil dan temuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun pada bab sebelumnya. Dari data yang diperoleh di lapangan, baik data observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diinterpretasikan dan didiskusikan sesuai data yang diperoleh serta dianalisis berdasarkan teori yang dipakai dalam penelitian ini.

### Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumenep

Bagian ini adalah analisis tentang kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep. Analisis tentang

kebijakan pengelolaan pendidikan dasar ini meliputi bentuk kebijakan dari pemerintah terkait dengan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada setiap satuan pendidikan di Kabupaten Sumenep, khususnya tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Kebijakan pengelolaan pendidikan di tingkat pemerintah daerah ini menjadi pijakan dan landasan bagi semua satuan pendidikan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan pendidikan ini juga termasuk kebijakan di tingkat sekolah yang menjadi tempat belajarnya anak didik dalam menerima transfer ilmu pengetahuan, yang berkenaan dengan peningkatan dan kemajuan sekolah di masa depan. Di bawah ini adalah hasil analisis tentang bentuk reformulasi kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep, sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan Pendirian Sekolah Baru

Kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep mengalami kerumitan ketika terjadinya beberapa lembaga pendidikan yang saling berdekatan antara satu lembaga dengan lembaga pendidikan yang lain di suatu desa. Inilah satu problematika pertama penempatan sekolah yang kurang memerhatikan terhadap peraturan pendidikan dari Pemerintah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh

<sup>18</sup> Juliyansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 141.

<sup>19</sup> M.B, Miles dan A.M. Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (California: SAGE PuB, 1984), 134.

Bapak Joko Sutrisno bahwa lembaga pendidikan di desa mengalami salah penempatan dari segi jarak, sehingga saling berdekatan antara satu dengan yang lainnya.<sup>20</sup>

Ungkapan ini memang menjadi kenyataan miris dalam penempatan lembaga pendidikan di suatu desa atau daerah. Menjamurnya lembaga pendidikan dasar dan Ibtidaiyah yang tidak strategis ini disadari oleh Bapak Ardiyansyah Ali Shohibi, yang mengatakan bahwa jumlah lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Sumenep sudah tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Sumenep. Jumlah tersebut sudah dikalkulasi dan dikolaborasikan antara Madrasah Ibtidaiyah dengan Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Sumenep.

Kalau pendirian Sekolah Dasar maupun MI itu diatur dalam Kemendikbud tentang sarana prasarana tahun 2007 bahwa pembangunan sekolah dasar atau MI itu harusnya ketika 2000 jumlah penduduk baru terbangun satu sekolah. Sumenep kalau dihitung secara umum sudah kelebihan lembaga. SD sama MI itu hampir di angka 1200.<sup>21</sup> Untuk pembangunan Sekolah Dasar (SD) baru di Kabupaten Sumenep ini sudah bisa dilaksanakan dengan adanya-alanya alasan mendasar yang dapat dibenarkan sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan Republik

Indonesia. Pembangunan SD baru yang ada di Kabupaten Sumenep ini bisa dibangun dengan catatan ada satu wilayah terpencil di daratan maupun kepulauan.

Sementara itu, Bapak Shadiq, Kepala Pengawas Madrasah (Pengma) Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan beberapa aturan-aturan yang ketat dalam proses pendirian lembaga pendidikan berbasis Madrasah yang baru. Ia menambahkan bahwa untuk mendirikan lembaga pendidikan juga memmperhatikan partisipasi masyarakat dan jumlah penduduk yang ada di sekitar lembaga pendidikan tersebut.

Dalam rangka membatasi pendirian lembaga pendidikan baru, maka pemerintah sudah melakukan beberapa aturan yang sangat ketat. Salah satunya adalah kelengkapan proposal pengajuan pendirian Madrasah baru yang juga menjadi perhatian. Bahkan, pihaknya melakukan survei langsung ke lokasi pendirian perencanaan Madrasah baru yang akan didirikan tersebut. Kemudian jika sudah terdapat lembaga baru di sekitar tempat pendirian, ternyata ditemukan ada berbagai lembaga yang sudah memenuhi syarat, maka pihaknya menerapkan persaingan sehat antara satu lembaga dengan lembaga lain di sekitarnya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Joko Sutrisno, Kepala SDN Dapenda, Batang-Batang, tanggal 03 September 2022.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Ardiyansyah Ali Sohibi, Kepala Bidang

Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Batang-Batang, tanggal 10 September 2022.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Shadiq, M.Pd Kepala Pengawas Madrasah (Pengma)

Bapak Shadiq menambahkan bahwa selain memperhatikan terhadap juknis dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan keterlibatan masyarakat di dalam pendirian sekolah baru. Hal yang paling urgen juga adalah tentu tentang pembiayaan yayasan dalam menggaji guru yang akan mengajar di sekolah tersebut. Bahkan, jika lembaga pendidikan yang sudah berdiri dan tidak bisa menjaga kualitas mutunya maka dari pihak Pengawas Madrasah juga akan menggusur lembaga tersebut. Apalagi jika ditambah dengan menurunnya kuantitas jumlah peserta didik di lembaga tersebut.

## 2. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru

Kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep mengenai penerimaan peserta didik baru atau PPDB adalah mengacu pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 18 tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumenep. Kebijakan tentang penerimaan peserta didik baru ini merupakan bagian dari sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep agar sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional.

Kebijakan yang paling krusial dan berkenaan langsung sistem pengelolaan lembaga pendidikan dasar adalah tentang usia masuk sekolah khusus tingkat Sekolah Dasar (SD), yaitu minimal usia tujuh tahun. Kebijakan persyaratan minimal usia masuk sekolah dasar ini mengacu pada pasal 6 yang menjelaskan secara rinci usia sekolah pada semua jenjang pendidikan yang termasuk bagian dari tingkat pendidikan dasar. Sementara itu, kebijakan mengenai jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar pada satuan lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat terdapat pada pasal 32. Kebijakan untuk tingkat sekolah dasar, jumlah minimal peserta didik adalah 20 orang dan maksimal berjumlah 28 orang peserta didik.<sup>23</sup>

## 3. Kebijakan Kesejahteraan Guru

Kebijakan tentang pengelolaan pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep adalah kebijakan pada aspek kesejahteraan guru, terutama guru honorer. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, kesejahteraan guru adalah termasuk bagian dari prioritas yang perlu diperjuangkan karena menyangkut hak seorang tenaga pendidik dalam menerima tunjangan sesuai dengan kinerjanya. Kebijakan tentang kesejahteraan guru merupakan prioritas

---

Kementrian Agama Kabupaten Sumenep, Batang-Batang, tanggal 10 September 2022.

<sup>23</sup> Peraturan Bupati Sumenep Nomor 18 tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta

Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumenep

utama yang bisa berdampak terhadap mutu pendidikan secara keseluruhan. Peningkatan pendapatan seorang guru tentu menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memberikan penghargaan atas dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan terbaik kepada anak didiknya.

#### **4. Kebijakan Pemerataan Pendidikan Tingkat Usia Dasar**

Dalam mengelola lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep, pemerintah telah melakukan program unggulan dalam meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan, terutama untuk pengelolaan pendidikan agar semakin maju dan semua warga negara mengenyam pendidikan sesuai tingkatan usianya. Pemerataan akses pendidikan diarahkan untuk memperluas daya tampung pada satuan pendidikan, terutama untuk tingkat sekolah dasar sehingga semua warga negara memiliki kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

#### **Implementasi Standar Mutu Pengelolaan Lembaga Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumenep**

Bagian ini adalah analisis tentang implementasi standar mutu pengelolaan pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep. Analisis tentang implementasi standar mutu pengelolaan pendidikan dasar ini mengacu pada standar pengelolaan pendidikan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

dan kepemimpinan kepala sekolah pada setiap satuan pendidikan di Kabupaten Sumenep, khususnya tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Standar pengelolaan mutu pendidikan di tingkat pemerintah daerah ini menjadi pijakan dan landasan bagi semua satuan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan lembaga pendidikan secara berkelanjutan.

Implementasi standar mutu pengelolaan pendidikan ini juga termasuk bagian dari peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi faktor penting dalam memajukan sekolah di tengah persaingan yang sangat ketat. Di bawah ini adalah hasil analisis tentang implementasi standar mutu pengelolaan pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep, sebagai berikut:

##### **1. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah**

Implementasi standar mutu pengelolaan lembaga pendidikan di Kabupaten Sumenep masih tidak sesuai dengan standard pendidikan nasional, terutama di dalam ketersediaan sarana dan Prasaran yang memadai. Lembaga pendidikan yang berstatus sebagai Sekolah Dasar (SD) maupun Madrasah Ibtidaiyah (MI) harus berusaha memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Standar Pendidikan Nasional, terutama berkaitan dengan standar sarana dan prasarana yang menjadi keniscayaan dalam pengelolaan lembaga pendidikan.

Kepala Sekolah SDN Dapenda II Batang-Batang ia sangat mendukung dengan adanya beberapa program yang telah diagendakan oleh pemerintah. Akan tetapi, kendala yang seringkali menghambat adalah tentang sarana prasarana sekolah yang belum memadai. Bagi sekolah yang kekurangan fasilitas dan sarana sekolah, maka perlu mengajukan pembiayaan kepada pemerintah untuk memperoleh bantuan sarana dan prasarana, semisal ketersediaan ruang belajar yang kurang representatif.<sup>24</sup>

Maka pihak sekolah harus percaya diri untuk mengajukan rehabilitasi pembangunan sekolah ke pemerintah jika jumlah murid yang ada di sekolah sangat sedikit. Ini menjadi bukti konkrit bahwa standard sarana dan prasarana yang ada di lembaga pendidikan dasar begitu memperhatikan apalagi yang berstatus sebagai Sekolah Dasar (SD) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Salah satu bentuk sarana dan prasana yang sangat dibutuhkan sekolah adalah ruang kantor yang masih kurang memadai. Selain itu, sekolah juga butuh ruang perpustakaan yang memadai sekaligus juga bahan bacaan bagi siswa dalam kegiatan membaca bersama dengan para guru. Ketersediaan perpustakaan tentu sangat urgen bagi semua siswa yang kekurangan bahan bacaan dalam

menunjuang kegiatan pembelajaran di dalam kelas.<sup>25</sup>

Selain itu, ketersediaan ruang guru merupakan salah satu indikator kemajuan sekolah yang sangat besar dampaknya bagi kenyamanan tenaga pendidik dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Jumlah ruangan yang tidak sebanding dengan jumlah murid juga menjadi permasalahan dalam pengelolaan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep. Bahkan, sebagian ruangan tersebut sudah tidak layak pakai untuk proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Maka, strategi implementasi standar mutu pendidikan di kabupaten Sumenep adalah penambahan ruang guru sebagai bagian dari kelengkapan fasilitas sekolah.

## 2. Peningkatan Keterampilan, Bakat, dan Minat Siswa

Peningkatan standar mutu sekolah tidak hanya dilakukan dengan keaktifan siswa dalam menerima materi pelajaran di dalam kelas, melainkan juga strategi yang sangat efektif untuk menopang kecerdasan dan kapasitas siswa adalah dengan peningkatan keterampilan, bakat, dan minat mereka pada bidang tertentu. Dalam rangka mengimplementasikan standar mutu pengelolaan pendidikan, sekolah harus mendukung pengembangan potensi dan keterampilan siswa. Kegiatan tersebut merupakan

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Joko Sutrisno, Kepala SDN Dapenda, Batang-Batang, tanggal 03 September 2022.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Haryono, Kepala SDN Banuaju Barat, Batang-Batang, tanggal 05 September 2022.



bagian dari kegiatan ekstrakurikuler yang mendapatkan perhatian dari sekolah secara langsung.

Ada beberapa bentuk kegiatan yang menjadi rutinitas atau kegiatan penting yang difasilitasi sekolah sebagai pemegang kebijakan dalam pelaksanaan standar mutu pendidikan. Pertama, kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan. Diantara kegiatan yang dilakukan adalah seminar manajemen sekolah, workshop peningkatan profesionalisme guru, dan kerjasama kelembagaan dengan sekolah lain. Kedua, kegiatan yang berkaitan dengan program kulikuler dan aktivitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Diantara kegiatan yang dilakukan adalah program tahfidz Juz 'Amma, strategi pembelajaran kreatif, dan perpustakaan masuk kelas, olimpiade sains, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dari aspek standard proses pendidikan yang dilakukan oleh sekolah dasar yang ada di kabupaten Sumenep menunjukkan sebuah mutu yang sangat baik. Dari proses pendidikan ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mengembangkan skill peserta didik maupun kegiatan-kegiatan lain yang menunjang terhadap pengembangan keilmuan di sekolah. Seperti yang dilakukan oleh MI Miftahul Ulum Batang-batang. Kegiatan program khusus di sekolah ini adalah program baca al-Qur'an dan kegiatan pramuka

yang melatih kedisiplinan dan kemampuan siswa dalam bekerjasama. Selain itu, siswa juga diberikan bimbingan khusus, yaitu *nubdatul bayan* setelah kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan oleh semua guru. Bahkan, ada kegiatan hafalan juz 30 bagi siswa madrasah ibtidaiyah yang dilaksanakan secara serentak untuk menunjang kemampuan bacaan dan hafalan al-Qur'an, sehingga diharapkan dapat membentuk generasi qur'ani.<sup>26</sup>

Peningkatan keterampilan, bakat, dan minat siswa merupakan bagian dari strategi implementasi standar mutu pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah dasar, baik, SD maupun MI. Pengembangan minat dan bakat di sekolah dasar difasilitasi oleh sekolah dengan beragam kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, Kursus Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, dan kegiatan lainnya. Peningkatan standar mutu pendidikan di sekolah memang butuh proses dan langkah strategis dari pengelola sekolah, karena tidak bisa dilakukan secara instan. Apalagi bagi sekolah yang masih belum maju dan belum memenuhi standar pendidikan nasional, baik dari pembangunan fisik maupun pembangunan intelektual dan spiritual masing-masing siswa.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Sya'roni, Kepala MI Miftahul Ulum, Batang-Batang, di Batang-Batang tanggal 04 September 2022.

### 3. Peningkatan Profesionalisme dan Kualifikasi Guru

Sementara itu, untuk standard pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah Dasar di Kabupaten Sumenep masih belum sepenuhnya memenuhi standard. Pasalnya, ada beberapa dewan Guru yang masih belum menyelesaikan program Sarjana (S1). Di sisi lain, ada juga yang sudah menjadi seorang magister (S2). Meski begitu, program dan peningkatan kapasitas guru di lembaga pendidikan masih terus dilaksanakan oleh internal sekolah atau dari pihak pemerintah Kabupaten Sumenep. Peningkatan kualitas guru adalah dengan pembekalan secara berkala dan adanya pelatihan bagi guru dalam membuat RPP pada setiap tahun 2 kali. Selain itu, peningkatan kualifikasi guru sudah dilaksanakan dengan bekal keahlian yang dimiliki masing-masing guru dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswanya.<sup>27</sup>

### 4. Penerapan Sekolah Berbasis Rintisan (Sekolah Berbasis Literasi dan Digital)

Strategi implementasi standar mutu pengelolaan pendidikan bukan hanya fokus pada standar isi (pengembangan kurikulum), melainkan juga bisa menerapkan berbagai kebijakan dari pemerintah daerah, terutama mengacu pada peraturan Bupati tentang

penerapan sekolah rintisan yang menjadi *prototype* bagi sekolah lain dalam memajukan lembaganya secara berkelanjutan. Salah satu strateginya adalah dengan menerapkan dan mengimplementasikan sekolah berbasis rintisan yang dapat menunjang peningkatan mutu sekolah di masa depan.

Bagi sekolah yang sudah memiliki standar mutu yang baik dengan akreditasi yang maksimal, maka bisa mengajukan untuk menerapkan sekolah berbasis rintisan. Salah satunya adalah penerapan sekolah berbasis digital (*digital school*). Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rintisan Penerapan Sekolah Berbasis Digital (*Digital School*) Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumenep, maka setiap sekolah atau lembaga pendidikan yang memenuhi syarat dapat mengajukan proposal sekolah berbasis rintisan. Sekolah berbasis digital ini meniscayakan penggunaan teknologi informasi dari semua aspek, mulai dari inovasi pembelajaran, sistem administrasi sekolah, media pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran, penyimpanan data sekolah berbasis digital.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ibu Muslimah, Kepala MI Taufiqurrahman, di Banuaju Timur, Batang-Batang tanggal 04 September 2022.

<sup>28</sup> Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rintisan Penerapan Sekolah

Berbasis Digital (*Digital School*) Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumenep

## **5. Peningkatan Sistem Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Program Sekolah**

Implementasi standar mutu pengelolaan pendidikan di Kabupaten Sumenep tidak lepas dari peran pengawasan oleh kepala sekolah pada setiap satuan pendidikan, kegiatan monitoring dan evaluasi program sekolah yang sudah dilaksanakan. Setiap program sekolah yang dilakukan tentunya ingin mencapai target keberhasilan dan kinerja yang bagus sebagai indikator mutu sekolah di masa depan. Salah satu strategi pengendalian dan ketercapaian standar mutu pendidikan di lingkungan sekolah adalah adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh setiap kepala sekolah di setiap instansi pendidikan, khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sumenep.

Adapun bentuk kegiatan pengawasan dalam setiap program sekolah adalah pengawasan pada setiap kegiatan pembelajaran di kelas dan kedisiplinan siswa maupun guru. Kepala sekolah memberikan pengawasan setiap hari pada semua personil sekolah, baik guru, tenaga administrasi, maupun siswa dengan harapan semuanya dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara maksimal. Kepala sekolah memberikan pembinaan bagi siswa yang melakukan pelanggaran atau melanggar

kedisiplinan sekolah dalam bentuk sanksi sesuai dengan kode etik sekolah.<sup>29</sup>

Selain itu, pihak sekolah juga melakukan monev atau monitoring dan evaluasi program sekolah yang sudah dilaksanakan. Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah program sekolah yang sudah direncanakan sudah terlaksana atau masih belum dilaksanakan secara baik. Dari kegiatan monitoring program sekolah, maka dilakukan evaluasi terhadap ketercapaian program, mulai dari aspek input (guru, tenaga kependidikan, dan karyawan), komponen proses (pengembangan kurikulum, bahan ajar, penilaian pembelajaran, dan kelembagaan), dan output (prestasi siswa, guru, dan sekolah).

## **6. Keaktifan Kepemimpinan Kepala Sekolah**

Tercapainya peningkatan mutu sekolah, tidak lepas dari pengaruh seorang pemimpin atau kepala sekolah dalam menjalankan perannya sebagai leader dan manajer yang bertanggung jawab pada setiap program sekolah. Standar mutu pengelolaan pendidikan sangat tergantung pada kinerja kepemimpinan kepala sekolah dalam memimpin lembaga pendidikan, yang nanti berdampak pada kemajuan sekolah secara keseluruhan. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan bagian dari

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Pragaan Laok 1, Kecamatan Pragaan Sumenep pada 3 September 2022.

manajemen dalam meningkatkan kinerja sekolah dalam mendukung keberhasilan atau pencapaian seluruh komponen sekolah.<sup>30</sup>

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan elemen terpenting dalam kemajuan sebuah lembaga, karena di samping sebagai pemimpin, ia juga berperan sebagai manajer yang melakukan pengelolaan terhadap setiap kegiatan atau program sekolah secara lebih signifikan. Keberhasilan sebuah lembaga tidak lepas dari kepemimpinan kepala sekolah yang mampu merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap setiap program secara berkelanjutan, sehingga sekolah bisa mencapai prestasi tinggi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.<sup>31</sup>

Bentuk kepemimpinan sekolah dalam peningkatan standar mutu pendidikan adalah adanya kerjasama yang baik antara semua komponen sekolah, mulai dari pihak komite, wali siswa, guru, karyawan, dan masyarakat sekitar. Jadi, strategi implementasi standar mutu pengelolaan pendidikan di sekolah adalah keaktifan dan keterlibatan kepala sekolah dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan dengan penuh tanggung jawab. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik adalah kepemimpinan yang demokratis dan transformasional

dalam mengelola pendidikan secara terbuka pada semua orang.

### **Dampak Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumenep**

Bagian ini adalah hasil analisis dampak kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep. Analisis dampak reformulasi kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep memuat tentang kebijakan pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama) dan kebijakan sekolah dalam melakukan pengelolaan pendidikan dasar (SD dan MI) di beberapa lokasi tingkat sekolah dasar di Sumenep. Analisis ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan kunci, terutama dari Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Sumenep dan Kasi Penma Kementerian Agama Sumenep serta pihak kepala sekolah yang menjadi sampel dari penelitian ini.

#### **1. Moratorium Pendirian Lembaga Baru**

Analisis dampak kebijakan pengelolaan terhadap pendidikan dasar yang ada di Kabupaten Sumenep adalah tidak mudah mendirikan lembaga baru, baik tingkat Sekolah Dasar maupun Madrasah Ibtidaiyah. Ini karena, pemerintah melalui Dinas Pendidikan

---

<sup>30</sup> Hasan Basri dan S. Tatang, *Kepemimpinan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 34-35.

<sup>31</sup> Rahmi Maulida, "Peranan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Mutu

Pendidikan Melalui Manajemen Berbasis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SDN Pangarangan III, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep".

dan Kementerian Agama melakukan pembatasan dan pengetatan pendirian lembaga pendidikan baru yang tidak sesuai dengan prosedur penyelenggaraan pendidikan. Dengan kebijakan pembatasan pendirian lembaga baru, maka ada moratorium terhadap lembaga pendidikan yang penempatannya tidak strategis dan tidak sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Menurut Kepala Pembinaan SD Dinas Pendidikan Sumenep, SD yang sudah berdiri sejak dulu melalui impress Presiden sebenarnya penempatannya sudah bagus. Akan tetapi, SD yang masih baru ini harus dilakukan moratorium agar tidak terjadi ketimpangan dalam hal jumlah siswa.

Untuk mencapai standar mutu pengelolaan pendidikan tingkat sekolah dasar, maka harus memperketat pendirian lembaga baru. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan yang membawahi Sekolah Dasar dan Kementerian Agama yang manaungi Madrasah Ibtidaiyah, tidak serta merta mengeluarkan izin secara mudah kepada sebuah Yayasan. Pemerintah tidak boleh mengeluarkan idzin pendirian lembaga baru kecuali di tempat-tempat terpencil. Hal ini tentu saja untuk menjaga standar mutu pendidikan di Kabupaten Sumenep yang terjadi ketimpangan antara pendidikan di daratan dan kepulauan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Ardiyansyah Ali Sohibi, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten

## 2. Pembatasan Pembangunan Sekolah

Dampak reformulasi kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di Kabupaten tentu menysasar pada pembangunan fisik gedung sekolah yang sudah tidak sesuai standar mutu pendidikan nasional. Dari data di lapangan kondisi sarana prasarana pendidikan dasar yang ada di Kabupaten Sumenep tidak sesuai dengan standard pendidikan yang sudah diatur oleh pemerintah. Menurut Bapak Shohibi, regulasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi problematika ini adalah menghentikan pembangunan fisik. Karena menurutnya, selama ini uang negara banyak tersedot ke pembangunan fisik semata. Maka, uuntuk mendirikan pendidikan dasar harus benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep sejatinya menyesuaikan dengan jumlah penduduk di satu desa. Sesuai dengan peraturan melalui intruksi Presiden, bahwa setiap desa minimal mempunyai satu lembaga tingkat Sekolah Dasar. Kalau SD negeri itu sebenarnya sudah berdiri lama sejak zaman Soekarno. Artinya, sudah cenderung berdiri lebih dulu dibandingkan dengan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Melalui impress sejak zaman presiden Soeharto. Karena

Sumenep, Batang-Batang, tanggal 10 September 2022 di Kantor Dinas Pendidikan Sumenep.

intruksi presiden, desa harus minimal punya SD. Akhirnya banyak bertebaran sekolah-sekolah. Terkait dengan sekolah yang saling berdekatan, sebenarnya diperbolehkan selama jumlah penduduknya mendukung untuk satu kelas sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai minimal jumlah siswa. Intinya, pembatasan sekolah baru bukan bermaksud untuk menghentikan niat baik setiap orang atau kelompok masyarakat, namun pemerintah tetap harus memberikan batasan dan aturan ketat untuk pendirian lembaga pendidikan baru.<sup>33</sup>

### 3. Peningkatan Standar Mutu Sekolah

Dampak reformulasi kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep pada aspek kualitas tentu akan mengurangi standar pendidikan nasional yang sudah ditetapkan pemerintah. Banyaknya lembaga pendidikan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk juga akan menjadi dampak yang signifikan terhadap pengelolaan pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep. Hal ini akan mempersulit dalam melakukan peninjauan atau evaluasi terhadap mutu sekolah di Kabupaten Sumenep.

Jika setiap desa berlomba-lomba untuk mendirikan lembaga baru, maka akan berdampak pada peningkatan

standar mutu sekolah dan siswa yang bersangkutan. Ini karena, bukan hanya kualitas pendidikan yang diperjuangkan dari pendirian lembaga baru, melainkan sudah masuk pada katagori memperbanyak keuntungan secara finansial dari adanya bantuan operasional pendidikan di setiap lembaga. Keberadaan lembaga yang tidak sebanding dengan jumlah siswa tentu akan berimplikasi pada sistem pengelolaan pendidikan secara umum, bukan hanya pada aspek peningkatan prestasi siswa secara khusus, namun pada pengendalian mutu sekolah yang akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Pada saat bersamaan, sistem pengawasan terhadap mutu pendidikan juga semakin sulit ketika jumlahnya banyak. Masalah penyediaan sarana prasarana di masing-masing sekolah juga merupakan bagian persoalan tersendiri. Di Sumenep, setidaknya ada 650 lembaga tingkat sekolah dasar yang harus dipikirkan sistem pengendalian dan pengelolaannya. Terlebih lagi masalah mutu guru, peserta didik, mutu bangunan, mutu kurikulum, capaian kurikulum, dan capaiannya targetnya.<sup>34</sup>

### 4. Regrouping

Reformulasi kebijakan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Sumenep

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Ardiyansyah Ali Sochibi, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Batang-Batang, tanggal 10 September 2022 di Kantor Dinas Pendidikan Sumenep

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Ardiyansyah Ali Sochibi, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Batang-Batang, tanggal 10 September 2022 di Kantor Dinas Pendidikan Sumenep

adalah jika ada sekolah yang dari sisi jumlah siswa kurang dari target sesuai dengan peraturan penyelenggaraan pendidikan, maka pemerintah melalui Dinas Pendidikan bisa melakukan *re-grouping* (mengelompokkan) atau menyatukan satu lembaga dengan lembaga lain yang dianggap memenuhi standar mutu pendidikan. Dampak kebijakan *re-grouping* ini memang membutuhkan banyak pertimbangan dan keputusan yang tepat karena bisa menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi orangtua wali siswa.

Dampak kebijakan *re-grouping* dari adanya pengelolaan pendidikan di Kabupaten Sumenep tentu menuai respon positif dan negatif dari pihak pengelola lembaga, orangtua wali, dan masyarakat sendiri. Beberapa kepala sekolah sangat menyayangkan tentang penempatan sekolah dasar yang tidak strategis dan semakin menjamur di tengah-tengah masyarakat, yang pada akhirnya harus dilakukan *re-grouping* dengan lembaga lain. Di sisi lain, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan melalui Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Sumenep menuai respon positif. Hal ini juga disampaikan oleh Pengawas Madrasah (Pengma) Kemenag Sumenep bahwa sekolah sekolah yang sudah tidak memenuhi standar dan persyaratan maka terpaksa akan digusur. Meskipun sekolah sudah berjalan selama beberapa

tahun, namun tidak ada perkembangan, maka lebih baik sekolah tersebut harus digusur.

Hal-hal yang sangat mendasar ini tentu menjadi problematika. Sekolah dasar yang ada di Kabupaten Sumenep dengan sekolah Madrasah. Artinya, dampak yang dirasakan oleh Madrasah dan sekolah Dasar di Kabupaten tidak bisa sepenuhnya untuk mengontrol implelementasi mutu sekolah di lapangan. Faktor banyaknya sekolah, tidak berbanding lurus dengan tenaga yang dibutuhkan untuk senantiasa mengawasi sekolah untuk tetap menjalankan mutunya. Karenanya, regulasi pemerintah ke depan selain memperketat pendirian sekolah juga memberikan tenaga yang professional dalam mengawasi kinerja Madrasah atau sekolah. "Untuk mengawasi mutu sekolah kita melakukan desiniminasi. Bagi yang mengikuti bimtek akan disampaikan kepada yang lain. Sambil lalu kita Supervise, dikontrol semuanya. Walaupun kadang kadang beraneka ragam kemampuan, semuanya tidak disamakan baik murid ataupun gurunya."<sup>35</sup>

##### 5. Persaingan dan Perebutan Murid

Dampak kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep adalah adanya persaingan dan perebutan murid bagi sekolah yang tidak melaksanakan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Shadiq, M.Pd Kepala Pengawas Madrasah (Pengma)

Kementrian Agama Kabupaten Sumenep, Batang-Batang, tanggal 10 September 2022.

yang sesuai dengan peraturan. Sementara itu, dampak yang akan ditimbulkan dari persaingan dalam perebutan murid antara sekolah SD dan MI, maka akan menimbulkan sarana dan prasarana yang tidak memadai di sekolah, khususnya di sekolah yang sudah kelebihan murid sehingga ruang perpustakaan juga menjadi ruangan pembelajaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Shadiq bahwa semakin membludaknya murid dari satu lembaga sehingga ruang perpustakaan itu akhirnya menjadi tempat penampungan murid.<sup>36</sup>

#### **6. Tertibnya Sistem Penerimaan Siswa Baru**

Kebijakan yang paling krusial dan berkenaan langsung sistem pengelolaan lembaga pendidikan dasar adalah terbitnya sistem penerimaan siswa baru, khususnya tingkat Sekolah Dasar (SD), yaitu minimal usia tujuh tahun. Kebijakan persyaratan minimal usia masuk sekolah dasar ini mengacu pada pasal 6 yang menjelaskan secara rinci usia sekolah pada semua jenjang pendidikan yang termasuk bagian dari tingkat pendidikan dasar. Sementara itu, kebijakan mengenai jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar pada satuan lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat terdapat pada pasal 32.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Shadiq, M.Pd Kepala Pengawas Madrasah (Pengma) Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Batang-Batang, tanggal 10 September 2022.

Kebijakan untuk tingkat sekolah dasar, jumlah minimal peserta didik adalah 20 orang dan maksimal berjumlah 28 orang peserta didik.<sup>37</sup> Hal ini tentu menjadi kebijakan yang berdampak positif bagi pengendalian dan pengelolaan lembaga pendidikan dasar agar semakin sesuai dengan standar pendidikan nasional.

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan beberapa kesimpulan. Pertama, bentuk kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep, yaitu kebijakan pendirian lembaga baru, penerimaan peserta didik, kesejahteraan guru, dan pemerataan pendidikan tingkat sekolah dasar. Kedua, implementasi standar mutu pengelolaan lembaga pendidikan dasar dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan keterampilan, bakat, dan minat siswa, peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan, penerapan sekolah berbasis digital dan literasi, peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi program sekolah, dan peningkatan skill kepemimpinan kepala sekolah. Ketiga, dampak kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Sumenep adalah moratorium pendirian lembaga baru, pembatasan pembangunan sekolah, re-grouping lembaga, persaingan dan perebutan murid, dan tertibnya sistem penerimaan siswa baru.

<sup>37</sup> Peraturan Bupati Sumenep Nomor 18 tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumenep



## Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Anwar, Herson. "Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Perspektif Pengelolaan Madrasah Aliyah Swasta, *Tadbir, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Nomor 5 No 1 Tahun 2017, 16.
- Ardiyansyah, Amir Chalis. "Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun", *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Arif, Barda Nawawi. *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Arwildayanto, Arifin Sukung, dan Warni Tune Sumar, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: CV. Cendekia Press, 2018.
- Basri, Hasan dan S. Tatang, *Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Calam, Ahmad dkk. Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling | BKI FITK UIN Sumatera Utara Medan, Vol. 10 No 2, Juli-Desember 2020.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press, 2004.
- Edward, Sallis. *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Ircisod, 2010.
- Ewan, F. Ewan. *The New Public Management in Action*. New York: Oxford University Press, 2007.
- Fitrah, Muh. Fitrah, Ruslan, Hendra. Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi, "*Jurnal Penjaminan Mutu*. Volume 4 Nomor 1 Pebruari 2018.
- Hasbullah, M. Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Hazin, M. Hazin, "Implementation of Character Education Policy at College", *In Proceeding the International Conference on Education Innovation*, Vol. 1, No. 1, 2017, 530-535.
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati. "Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam: Studi Histori dan Regulasi di Indonesia". *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021, 295-296.
- Herlina, Feni dkk, "Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 2 No 2 Tahun 2020.
- Hornbay, A.S. *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English*. tp: Oxford University Press, 1963.
- Irham, Muhammad et. all. *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

- Islamy, Irfan M. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2003.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Maisaroh. "Quality of Educational Management at the Elementary School: Case Study on Madrasah Ibtidaiyah Jakarta". *JMIE: Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education*. 2 (1), 2018, 144-154.
- Mesiono. "Kebijakan Pendidikan dan Pengembangan Sekolah. *Jurnal Tazkirah*, Vol. 2, No. 2, 2010, 3-6.
- Miles, M.B dan A.M. Huberman. *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE PuB, 198.
- Minarti, Sri. *Manajemen Sekolah; Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Arruz Media, 2011.
- Moses. Melmambessy. "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua." *Media Riset Bisnis & Manajemen* 12.1 (2012): 18-36.
- Muhadjir, Noeng. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000.
- Muhammad, Sahril dan Mardika Rahman. "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Sekolah Dasar Islam Insan Kamil Bacan Kabupaten Halmahera Selatan". *Edukasi: Jurnal Pendidikan*. 15 (1), 2017, 610-620.
- Muhibbuddin. M.M. "Program Mitra Warga sebagai Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Surabaya," *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 1 (1), 2016. 23-30.
- Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasinya*. Bandung: Rosda Karya, 2008.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Newton, Colin Newton & Tony Tarrant. *Managing Change in School*. London: Routledge, 1992.
- Noor, Juliyansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan Ke-Dua atas PP No. 19 Tahun 2009. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Pollit. *The New Managerialism and The Public Service*. Oxford: Basil Blackwell, 2010.
- Putro, Ahmad Agung Yuwono, Suyanto, dan Yoyon Suryono. "Educational Management for Elementary Based on Baiquiniyyah Koranic School". in *2nd*

- International Conference on Educational Management and Administration*. 45 (1), 2017, 132-137.
- Rahmi Maulida, "Peranan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Berbasis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SDN Pangarangan III, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep.
- Rahmi, Elvi, Achmad Patoni, dan Sulityorini. "Management of Human Resources Development in Increasing the Quality of Islamic Education Institutions in Excellent Islamic Elementary School Kota Bukittinggi". *Al-Ta'lim Journal*. 27 (2), 2020, 166-178.
- Rohman, Arif, *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Mediatama, 2009.
- Sagala, Syaiful. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: IKAPI, 2009.
- Sakadari, Miftachul Huda, Eko Perianto, Haryanto, dan Edi Subarkah. "Improving Educational Quality of Elementary School in Indonesia: An Emperical Research". *Journal of Southwest Jiaotong University*. 56 (4), 2021, 330-336.
- Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Dari Denzin Guba dan Penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Simatupang. "Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan". *Analisis Kebijakan Pertanian*, 1(1), 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2002.
- Suharto, Toto. *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: LKIS, 2012.
- Sumarsono, Raden Bambang, Ali Imron, Bambang Budi Wiyono, dan Imron Arifin. "Parent's Participation in Improving the Quality of Elementary School in the City of Malang, East Java, Indonesia". *International Education Studies*. 9 (10), 2016, 256-262.
- Suryosubroto. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Suzana, Raja, Makruf Akbar, dan R. Madhakomala. "Character Educational Management: A Case Study in the Elementary School Penyengat Island". *Indonesian Journal of Educational Review*. 5 (1), 2018, 23-27.
- Takdir, Mohammad. *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Tilaar, H.A.R. *Standar Pendidikan Nasional, Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.



- Tirtarahardja, Umar dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.
- Titzer, George. *Sociology: A Multiple Paradigm Science*. Boston: Allyn and Bacon, 1980.
- Tjiptono, Fandy dan Anastasia Diana, *Total Quality Management*. Yogyakarta: Andi Offset, 2003.
- Ulfatin, Nurul. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Malang: Banyu Media Publishing, 2004.
- Wojowasito, S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Malang: CV Pengarang, 1999.
- Nuris Syarifatul Imamiyah, Ainur Rofieq dan Mohammad Syaifuddin, “Analisis Problematika Pembelajaran Sekolah Dasar Negeri di Pulau Giliyang Kabupaten Sumenep,” *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, 2018, 158-174.